

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL  
KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
(Studi Di Kalimantan Barat)**

**Oleh :**

**SUTRISNO,S.H**

**A.2021131081**

**Prof. H. Slamet Rahardjo, SH**

**Paulus Nyangkar Sufmana, SH., M.Si**

**Abstrak**

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (Money laundering), dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Tindak Pidana mempunyai (Tipikor) Pengadilan Pontianak, sepanjang tahun 2014 telah menyidangkan 68 berkas perkara korupsi dan semuanya telah memiliki keputusan tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 55 perkara korupsi telah disidangkan dan 36 perkara diantaranya sudah diputus atau sudah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang, namun pada pra-penelitian di Polda Kalbar di indikasikan ada kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur pidana pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dipergunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya pada

saat penelitian dilakukan, yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual dan kemudian data yang terkumpul dikelompokkan, kemudian dilakukan analisa secara komprehensif dan mendalam. Adapun pendekatan penelitian yang dianggap relevan dipergunakan adalah secara sosio-legal.

Kata kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang dan Korupsi

## **ABSTRACT**

Money laundering or better known by the term money laundering in Indonesia became one of the nation's problems unresolved . Money laundering is a term that is often heard from various mass media , which is termed by money laundering , money laundering , panning money or it could be cleaning money from illicit transactions ( gross ) . For economic crimes , especially crimes of corruption are closely related to alleged money laundering ( Money laundering) , in which today's money laundering practices are very often made to money obtained from the crime of corruption . Money laundering (money laundering ) is one way to provide cover or concealment of the results of corruption are done. Based on data obtained from the Registrar Crime has (Corruption) Court of Pontianak , throughout 2014 has trial 68 case files of corruption and all of them have had a permanent decision that has permanent legal force ( *inkracht van gewijsde* ) and in 2015 there were 55 cases of corruption cases have been tried and 36 cases of which have been cut or own decisions and binding equipment ( *inkracht van gewijsde* ).

Recognizing the importance of law enforcement in money laundering , which oriented the many cases of corruption crimes that potentially caused the crime of money laundering , but the pre - research at Polda Kalbar indicated there are problems in the handling of money laundering , one of which relates to the meaning elements of money laundering. It can be seen that the role of the investigator has a very important role in the prevention and combating of money laundering. The method used in this study used methods of Descriptive Analysis , which describes a situation or event that occurs as they are at the time the study conducted , focusing on actual problems and then the collected data is grouped , and then analyzed in a comprehensive and in-depth . The research approach used is considered relevant socio –legal.

Keywords: Law enforcement, Crime , Money Laundering and Corruption

## **Pendahuluan**

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Secara umum, “pencucian uang” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk “mencuci atau membersihkan” asal usul harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status menjadi alat pembayaran yang sah.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang merupakan kelanjutan dari kejahatan-kejahatan atau tindak pidana lain (follow up crime), sedangkan kejahatan utama atau kejahatan asalnya disebut predicate offense atau core crime yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang kemudian dilakukan proses pencucian, kejahatan ini merupakan satu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime), yakni suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang maupun korporasi baik pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang untuk mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.

Pada dasarnya semua tindak pidana ekonomi (kejahatan keuangan) akan bermuara pada perbuatan pencucian uang, maka seharusnya penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang harus sebanding terhadap banyaknya perkara kejahatan ekonomi, misalnya perkara dari korupsi, kejahatan perbankan, illegal logging, penyelundupan, penipuan, penggelapan dan lain-lain. Seharusnya dipahami bahwa kriminalisasi pencucian uang merupakan suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi. Bukan saja melalui upaya penerapan hukum terhadap kejahatan asal, tetapi juga menghadang aliran hasil kejahatan dengan ketentuan anti pencucian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan anti pencucian uang bertujuan tidak saja menangkap pelakunya tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya.

Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (Money laundering), dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan terhadap uang yang

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, “*Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*”, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 62

diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yakni sebagai berikut :

**Pertama,** Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian bangsa pada khususnya. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya money laundering bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.

**Kedua,** dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.<sup>3</sup>

Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya

---

<sup>2</sup> H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012) hlm.12

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 13

sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Perkembangan regulasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih belum berjalan maksimal. Berdasarkan data dari FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) di tahun 2001 telah memasukan Negara Indonesia bersama 18 negara lainnya kedalam daftar NCCT'S (Non Cooperative Countries and Territories) yakni negara yang dianggap belum signifikan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Tahun 2004 Indonesia masih menjadi penghuni daftar NCCT'S bersama tujuh negara lainnya.<sup>4</sup>

Sementara negara-negara lain telah membuat kemajuan yang signifikan terkait penanganan melalui upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, sehingga tidak lagi di kenakan pemantuan oleh FAFT, seperti pada negara Aljazair, Angola dan Panama. Sebagaimana Pernyataan Umum dari Financial Action Task Force FATF Pernyataan Umum pada 26 Juni 2015 (FATF Public Statement - 26 June 2015).

The FATF recognised that Algeria, Angola and Panama have made significant progress in improving their regimes to combat money laundering and terrorist financing and will therefore no longer be subject to the FATF's monitoring process. The FATF identified jurisdictions which have strategic AML/ CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF.<sup>5</sup>

Salah satu upaya Strategis dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah di bentuk badan yang bersifat independen yang disebut sebagai Financial Intellegent Unit (FIU). Tugas dan keberadaan FIU sesungguhnya untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang kemungkinan dicurigai adanya praktik pencucian uang, dalam hal ini sebetulnya tugas FIU melakukan penyelidikan dalam hal kejahatan pencucian uang. Di Indonesia badan ini disebut dengan Pusat Pelaporan dan

---

<sup>4</sup> <https://antonwords.wordpress.com/2014/01/14/pembuktian-terbalik-tindak-pidana-pencucian-uang-atau-money-laundering/>, dunduh pada 28 Januari 2016

<sup>5</sup> <https://index.baselgovernance.org/ranking>, diunduh pada pada 28 Januari 2016

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang.

Dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang khususnya yang di peroleh dari hasil kejahatan korupsi, selain dibutuhkan kemampuan penegak hukum yang mempunyai sumber daya manusia yang handal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sinergitas di antara pemangku kepentingan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam pemberantasan TPPU melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan, lembaga penegakan hukum, PPATK, dan instansi terkait lainnya sebagai sub sistem.

1. Bank Indonesia

Merupakan pengawas dan pembina industri perbankan, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing dan kegiatan usaha pengirim uang (KUPU). Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, misalnya peraturan tentang penerapan KYC (Know Your Customer) dan penugasan khusus Direktur Kepatuhan pada bank umum untuk dapat menerapkan ketentuan perbankan yang sehat.

2. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga keindependennannya, ketentuan mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.

Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;

- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.<sup>6</sup>

### 3. Pihak Pelapor

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut:

a. penyedia jasa keuangan:

- 1) bank;
- 2) perusahaan pembiayaan;
- 3) perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
- 4) dana pensiun lembaga keuangan;
- 5) perusahaan efek;
- 6) manajer investasi;
- 7) kustodian;
- 8) wali amanat;
- 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
- 10) pedagang valuta asing;
- 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- 12) penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
- 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- 14) pegadaian;
- 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
- 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

- 1) perusahaan properti/agen properti;
- 2) pedagang kendaraan bermotor;
- 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- 4) pedagang barang seni dan antik; atau
- 5) balai lelang.<sup>7</sup>

### 4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 40 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>7</sup> Pasal 17 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan nonbank. Terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang, sebagai tindakan pencegahan, Bapepam-LK mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal antara lain perusahaan efek, pengelola reksa dana, dan kustodian. Sementara itu, yang dimaksud dengan lembaga keuangan non-bank antara lain perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAPEPAM-LK juga berwenang mengadakan pemeriksaan, penyidikan, bahkan menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut.

#### 5. Kementrian Komunikasi dan Informatika

Merupakan regulator/ pengawas perposan sebagai salah satu Pengelola Jasa Keuangan (PJK) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### 6. Kementerian Perdagangan

Merupakan regulator / pengawas perdagangan

#### 7. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)

Merupakan salah satu unit di bawah Kementrian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti-pencucian uang terkait dengan pelaporan Cross Border CashCarrying (CBBC), yaitu pembawaan uang fisik lintas negara.

#### 8. Penegak hukum

Berikut ini adalah penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

##### a. Penyidik Tindak Pidana Asal

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai berikut :



- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Kejaksaan
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 4) Badan Narkotika Nasional (BNN)
- 5) Direktorat Jenderal Pajak
- 6) Direktorat Jenderal Bea Cukai

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya

#### b. Pengadilan

Melaksanakan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang pada sidang pengadilan. Khusus di pengadilan tindak pidana korupsi, perkara yang diproses selain perkara tindak pidana korupsi juga perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengamanatkan kewenangan dan tugas PPATK dalam proses perputaran transaksi keuangan yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk perbuatan asalnya (original crime), Kewenangan penyidikan terhadap TPPU tidak diatur secara khusus dan tegas dalam tersebut, namun mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 yang berwenang melakukan penyidikan TPPU adalah penyidik Polri. Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana. Hal ini ditegaskan kembali dengan Pasal 1 angka 8,9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Informasi transaksi keuangan yang terindikasi praktik pencucian uang diterima oleh PPATK dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah penyedia jasa keuangan, maka selanjutnya dianalisis lebih mendalam dan untuk menyakinkan dari kejahatan apakah uang yang ditransaksikan tersebut. Hasil analisis ini kemudian dikirim kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian setelah ditambah

informasi dan bukti lainnya sesuai dengan unsur kejahatan pencucian uang, sehingga data awal dari PPATK tadi ditindaklanjuti oleh polisi ke tahap berikutnya yaitu penyidikan dan pelakunya dinyatakan sebagai tersangka.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan penyidikan pada penyidik tindak pidana asal. Jadi bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan apabila penyidik tindak pidana asal menemukan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Namun, jika memang perkara pidana itu terjadi dalam ranah perbankan dan melibatkan juga tindak pidana korupsi di dalamnya, maka penyidik tindak pidana asal dapat menyampaikan kepada penyidik Polri untuk menindaklanjutinya.

Perkara kejahatan keuangan khususnya dalam perkara korupsi yang di tangani oleh Polri yang seharusnya dapat di tindak lanjuti hasil kejahatan korupsi tersebut oleh penyidik. Penyidik harus mengembangkan informasi atau bahan keterangan yang ada pada saat penanganan perkara tindak pidana korupsi, bekerjasama dengan PPATK yang berfungsi sebagai national focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Dalam hal ini, PPATK merupakan Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas melakukan proses intelijen dan menyampaikan informasi intelijen keuangan kepada pihak penyidik untuk digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transfer Dana yang dikirimkan oleh PJK (bank dan non bank), Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) dari Dirjen Bea dan Cukai, dan Laporan Transaksi dari Penyedia Jasa dan/ atau Barang (PJB). Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di singkat Polda Kalbar melalui Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) dan jajaran Kepolisian Resort (Polres) selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 telah menangani perkara tindak pidana korupsi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kasus,<sup>8</sup> sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Tindak Pidana mempunyai (Tipikor) Pengadilan Pontianak, sepanjang tahun

---

<sup>8</sup> Sumber data Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kalbar, pada 25 januari 2016

2014 telah menyidangkan 68 berkas perkara korupsi dan semuanya telah memiliki keputusan tetap yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 55 perkara perkara korupsi telah disidangkan dan 36 perkara diantaranya sudah diputus atau sudah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap tetap (inkracht van gewijsde).<sup>9</sup>

Setiap perkara tindak pidana korupsi tersebut seharusnya dapat di tindak lanjuti pada proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena setiap tersangka dalam kejahatan korupsi ingin menyembunyikan hasil kejahatannya agar tidak mudah dilacak oleh lembaga penegak hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) penegak hukum mendapat legitimasi menangani TPPU (predicate crime : korupsi) sehingga kegiatan asset tracking (pelacakan aset) juga diarahkan untuk :

- Mendeteksi sejak awal (sejak tahap penyidikan) seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi;
- Hasil asset tracing digunakan selain untuk pembuktian tindak pidana korupsi juga untuk menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).<sup>10</sup>

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menangani perkara tindak pidana pencucian uang sebanyak 20 (dua puluh) kasus, dengan rincian 16 perkara pencucian uang di tangani Direktorat Kriminal khusus Polda Kalbar dan 4 perkara pencucian uang di tangani oleh Polres Jajaran Polda Kalbar yakni : 2 perkara oleh Polresta Pontianak, 1 perkara oleh Polres Singkawang dan 1 perkara oleh Polres Kapuas Hulu.<sup>11</sup>

Selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dari jumlah total kejahatan tindak pidana korupsi yang di tangani Polda Kalbar sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kasus, namun total perkara tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang sudah di tangani oleh Polda Kalbar selama 2 (dua) tahun baru mencapai 20 (dua puluh) perkara. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pencapaian kinerja Penyidikan

---

<sup>9</sup> <http://equator.co.id/36-kasus-tipikor-di-pn-pontianak-inkrah/>, di unduh pada tanggal 5 April 2016

<sup>10</sup> <http://parismanalush.blogspot.co.id/2015/03/perampasan-aset-terhadap-hasil-tipikor.html>, di unduh pada tanggal 5 April 2016

<sup>11</sup> Sumber data dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalbar, pada 25 januari 2016

Polda Kalbar dalam pengusutan kasus kejahatan tindak pidana korupsi kemudian ditindaklanjuti pada proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang masih minim.

Berbagai kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang salah satunya disebabkan pihak Kepolisian menerima laporan dari PPATK atas adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, ternyata Kepolisian masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian setelah ditambah informasi dan bukti lainnya sesuai dengan unsur kejahatan pencucian uang, maka oleh polisi data awal dari PPATK tersebut ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan pelakunya dinyatakan sebagai tersangka. Dari hasil analisis yang disampaikan PPATK kepada Kepolisian, ternyata kebanyakan dinyatakan tidak ada bukti permulaan dugaan pencucian uang. Hal ini menunjukkan belum terdapat kesamaan persepsi antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan, yang dapat menjadi kendala berkaitan dengan pemaknaan unsur tindak pidana pencucian uang.

Kepolisian tidak selalu harus menunggu laporan atau hasil investigasi dari PPATK, bisa saja Kepolisian melakukan penyelidikan awal atas adanya dugaan pencucian uang. Dalam kasus seperti misalnya Kepolisian telah mempunyai bukti awal tentang adanya korupsi atau misalnya adanya aliran dana illegal logging, pertambangan illegal, kejahatan penyalahgunaan Narkoba atau kejahatan keuangan lainnya, justru Kepolisian berinisiatif meminta bantuan PPATK untuk melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan atas rekening tertentu yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Sehingga Kepolisian telah mempunyai bukti awal atas tindak pidana pencucian uang dari perkara yang di tangani.

Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang, namun pada pra-penelitian di Polda Kalbar di indikasikan ada kendala dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur pidana pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang..

### **Permasalahan**

1. Bagaimana peran penyidik Polda Kalimantan Barat dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (money laundering) dari hasil kejahatan korupsi

berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

2. Kendala apa saja yang dihadapi penyidik Polda Kalimantan Barat dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

### **Pembahasan**

#### **1. Peran Penyidik Polda Kalbar Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Korupsi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat disingkat Polda Kalbar yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak, merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang menyelenggarakan tugas Kepolisian pada tingkat kewilayahan di Provinsi Kalbar. Dengan dibantu Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah baik secara pelaksana operasional maupun administrasi. Unsur pembantu dan pelaksana tugas pimpinan/ Kapolda Kalbar, antara lain:<sup>12</sup>

1. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
2. Biro Operasi yang selanjutnya disingkat Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
3. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Rorena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
4. Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Ro SDM adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
5. Biro Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disingkat Rosarpras adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

---

<sup>12</sup> Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

6. Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bidhumas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
8. Bidang Hukum yang selanjutnya disingkat Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
9. Bidang Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya disingkat Bid TI Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
10. Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disingkat Spripim adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Sekretariat Umum yang selanjutnya disingkat Setum adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
11. Pelayanan Markas yang selanjutnya disingkat Yanma adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
12. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
13. Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
14. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disingkat Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
15. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

16. Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disingkat Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
17. Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
18. Direktorat Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Ditsabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
19. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
20. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
21. Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
22. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat Dittahiti adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
23. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disingkat Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
24. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
25. Bidang Keuangan yang selanjutnya disingkat Bidkeu adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
26. Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Biddokkes adalah unsur pendukung pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

28. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Kepala Polda Kalbar disingkat Kapolda Kalbar adalah pimpinan ditingkat Polda Kalbar merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri yang membawahi wilayah hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Polda Kalbar membawahi 2 (dua) Polresta dan 10 Polres di wilayah Jajaran Polda Kalbar yaitu : Polresta Pontianak Kota, Polresta Singkawang, Polres Mempawah, Polres Sintang, Polres, Ketapang, Polres Ngabang, Polres Putussibau, Polres Sanggau, Polres Sambas, Polres Bengkayang, Polres Sekadau dan Polres Melawi. Polda Kalbar merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah Provinsi Kalbar yang bertugas dalam penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Sehingga dalam hal menegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dari KUHAP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berfungsinya proses peradilan pidana sangat tergantung pada keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian. Aparat Kepolisian selaku penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana apakah uang dari hasil kejahatan pidana korupsi telah dilakukan proses pencucian uang.

Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Polda Kalbar dilaksanakan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) yakni bagian Sub Direktorat (Subdit) II Bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan 22 anggota dengan 4 diantaranya berpangkat Perwira Pertama dan 18 anggota berpangkat Bintara. Sedangkan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan



oleh Sub Direktorat III Bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan 11 anggota dengan 2 diantaranya berpangkat Perwira Pertama dan 9 anggota berpangkat Bintara.<sup>13</sup>

Bahwa dari hasil penelitian di Polda Kalbar tidak semua perkara tindak pidana korupsi di lakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang, hal ini sangatlah ironi mengingat setiap kejahatan keuangan khususnya kejahatan tindak pidana korupsi sangat memungkinkan pelaku melakukan pencucian uang terhadap kekayaan hasil kejahatannya tersebut. Berikut ini akan ditampilkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi dan kemudian di tindak lanjuti pda proses penyidikan tindak pidana pencucian uang di Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalbar pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk tabulasi.

**Tabel 3**

**Perkara Tindak Pidana Korupsi Kemudian Di Tindak Lanjuti Proses Penyidikan  
Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda Kalbar Pada Tahun 2014 Sampai  
Dengan Tahun 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Perkara TP Korupsi Yang Telah Dilakukan Proses Penyidikan</b>	<b>Perkara TP Pencucian Uang dari Pidana Asal (Predicate Crimes) Pidana korupsi</b>
2014	40	5
2015	31	1
<b>Jumlah</b>	71	6

Sumber Data: Dit Reskrimsus Polda Kalbar, pada November 2015

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa di Polda Kalbar pada tahun 2014 jumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan proses penyidikan sebanyak 40 perkara, sedangkan dari jumlah tersebut hanya 5 perkara yang di tindak lanjuti pada proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2015 jumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan proses penyidikan sebanyak 31 perkara, sedangkan dari jumlah tersebut hanya 1 perkara yang di tindak lanjuti pada proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Sehingga sepanjang tahun 2014

<sup>13</sup> Sumber Dit Reskrimsus Polda Kalbar, pada tanggal 22 Januari 2016

sampai dengan tahun 2015 jumlah perkara tindak pidana korupsi sebanyak 71 perkara kemudian dari jumlah tersebut hanya 5 perkara atau 8,45 % perkara tindak pidana korupsi yang di tindak lanjuti pada proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data tersebut dapat di ketahui bahwa untuk pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana pokok (predicate crimes) tindak pidana korupsi di Polda Kalbar belum maksimal.

Berikut ditampilkan data penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan pidana korupsi yang di tangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalbar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk tabulasi

**Tabel 4**

**Data Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dari  
Hasil Kejahatan Korupsi yang di tangani Polda Kalbar  
Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>LP/ Pelapor</b>	<b>Uraian Singkat</b>	<b>Pasal</b>	<b>Tp. Asal</b>
1.	LP/464/V/ 2014/Bares krim tanggal 7 Mei 2014.  Pelapor ; DEWA NYOMAN	Pelapor saat menangani perkara menemukan adanya perkara baru yaitu TP.Pencucian Uang, terlapor IJ selaku Kepala Seksi Pabean KPPBC Entikong, terlapor HLP selaku Kepala KPPBC Entikong Periode 2008-2011 dan terlapor HL selaku Broker Importasi. Terlapor IJ bersama-sama HLP telah berbuat sesuatu dengan memberikan kesempatan dan tidak melakukan pencegahan terhadap terlapor HL yang tidak memiliki ijin dan kapasitas sebagai importer melakukan importer barang melalui daerah pabean entikong Kalbar. Terlapor IJ menerima dan pentransferan sejumlah uang dari rekening milik HL	Psl 3, Psl 4 dan Psl 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberanta san TPPU	Korupsi
2.	LP/154/IX/ 2014/Kalb ar/SPKT	Sdri. TY telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak	Psl 5 dan 10 UU No. 8 Th 2010 ttg	Korupsi

	<p>tgl 20 Sept 2014</p> <p>Pelapor : ENGKUS KUSNADI</p>	<p>pidana berupa : berupa 4 (empat ) buah Sertifikat Hak milik tanah atas nama AH dengan nomor 6116, 6261, 4795, 4796 dengan peralihan hak kepada TY melalui notaris EDDY DWI PRIBADI dan PPAT BUDI SETIADI.</p>	<p>Pencegahan dan Pemberantasan TPPU</p>	
3	<p>LP/162/X/2014/Kalb ar/SPKT tanggal 3 Oktober 2014</p>	<p>Pelapor menangani perkara dugaan TP.Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Korupsi dengan Tersangka IJ ternyata ditemukan tindak Pidana Lain yaitu dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Korupsi dengan Terlapor AG yang mana AG selaku broker Importir ada mentransfer atau mengalirkan dana sebesar Rp 422 Juta ke rekening HL yang dikuasai oleh Sdra. HLP</p>	<p>Psl 5 dan 10 UU No. 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU</p>	Korupsi
4	<p>LP/153/IX/2014/Kalb ar/SPKT tgl 20 Sept 2014</p> <p>Pelapor : ENGKUS KUSNADI</p>	<p>Terlapor AKBP IEP adlh anggota Kepolisian Polda Kalbar yg diberikan kewenangan selaku Kasubdit III Dit Res Narkoba atau selaku ketua tim penyidikan Tindak Pidana Narkotika dgn Tersangka AH telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yg sebenarnya atas harta kekayaan berupa pengalihan hak berupa SHM milik tersangka AH</p>	<p>Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU</p>	Korupsi

5	LP/128/VII I/2014/Kal bar/ Res KH tanggal 4 Agustus 2014  Pelapor :	Dari perkara TP Korupsi dalam bentuk pemotongan pagu anggaran PPIP Kab. Kapuas Hulu Ta. 2013 (LP / 81 / V / 2014 / Kalbar / Res-KH, tgl 28 Mei 2014) telah ditemukan kerugian Negara sbsr Rp. 930.000.000 sesuai dengan hasil audit Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Kalbar, dan uang hasil tersebut telah dibelanjakan, dialihkan, dibayarkan dan mengubah bentuk dengan membeli ATK selama kegiatan PPIP, membayar kepada FM / FT yang berjumlah 20 orang, pembayaran hutang tersangka dan sisanya dipergunakan oleh tersangka untuk kebutuhan pribadi berupa membeli motor, camera, HP merk OPPO, mendirikan perusahaan, membuat Asuransi AXA Mandiri, dimasukan ke deposito berjangka.	Psl 3 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberanta san Tindak Pidana Pencucian Uang	Korupsi
6	LP/08/A/I/ 2015/Kalb ar/Res Skw, tgl 21 jan 2015 Pelapor :	Pada tahun 2008 BPN RI mengadakan proyek program pembaruan agrarian Nasional (PPAN) pada giat retribusi tanah objek landreform TA.2008 di Skw adalah di Kel.Sagatani dengan luas 1538 HA dan telah diterbitkan sertifikat hak milik petani sebanyak 769 persil dari sebanyak 769 persil hak milik yang diterbitkan sebanyak 158 persil dikuasai oleh terlapor.	Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 UU No. 8 Thn 2010 ttg TPPU	Korupsi

Sumber Data: Dit Reskrimsus Polda Kalbar, pada November 2015

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa di Polda Kalbar pada tahun 2014 sampai dengan bulan November 2015 telah menangani perkara tindak pidana pencucian yang berasal dari kejahatan pokok tindak pidana korupsi sebanyak 6 perkara, dimana pada tahun 2014 di ketahui sebanyak 5 perkara dan pada tahun 2015 sebanyak 1 perkara, sehingga pada tahun 2015 terjadi penurunan sebanyak 4 perkara atau 80 % perkara pidana pencucian uang dari kejahatan korupsi. Perkara tindak pidana

pencucian uang yang di tangani oleh penyidik pada Subdit II Bidang tindak pidana pencucian uang Dit Krimsus Polda Kalbar selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 merupakan perkara lanjutan dari penanganan perkara pidana pokok (predicate crimes) yang sebelumnya telah di tangani oleh penyidik pada Subdit III Bidang Bidang tindak pidana korupsi Dit Krimsus Polda Kalbar itu sendiri.

Sehingga dari beberapa data diatas yang telah di tampilkan, dapat ditarik analisa mendasar terkait proses pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dari tabel 2 menunjukan jumlah perkara yang telah incracht pada tahun 2014 sampai 2015 adalah sebanyak 104 kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan pada tabel 3, di Polda Kalimantan Barat selama durasi tahun 2014 sampai 2015 dari 71 jumlah perkara tindak pidana korupsi, ada 6 perkara yang telah diproses sampai ke tahap penyidikan tindak pencucian uang. hal ini dapat menjadi bahan perbandingan dan menimbulkan persepsi awal, bahwa proses penyidikan yang saat ini dilakukan belum maksimal dalam penuntasan setiap kasus tindak pidana korupsi yang pasti menimbulkan kerugian negara. Dimana idealnya, penuntasan kasus tersebut akan berakhir pada proses penyidikan kasus pencucian uang.

Masih banyaknya jumlah perkara tindak pidana korupsi yang belum di tindak lanjuti pada proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut, dapat menjadi barometer sementara atau merupakan salah satu sebab bahwa belum optimalnya peran penyidik Polda Kalimantan Barat dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) II Bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Dit Reskrimsus Polda Kalbar AKBP Dewa Nyoman, S.Ik, MH yang menerangkan bahwa salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan tugas penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang di tangani Subdit II Bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Dit Reskrimsus Polda Kalbar adalah karena jumlah anggota pada Subdit II lebih sedikit di banding jumlah anggota yang terdapat pada Subdit lain, sehingga jumlah perkara yang di tangani tidak sebanyak jumlah perkara yang di tangani oleh Subdit lain di Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalbar.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan AKBP Dewa Nyoman, S.Ik.,MH, Kepala Subdit II Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dit Reskrimsus Polda Kalbar pada tanggal 28 desember 2015

Minimnya jumlah pengungkapan tindak pidana pencucian uang salah satunya dikarenakan tindak pidana pencucian uang pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari kejahatan/ tindak pidana tersebut, sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada. Sehingga tidak ada 1 pun perkara tindak pidana pencucian uang yang di tangani Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar yang berasal dari laporan masyarakat. Selain itu yang menyulitkan pihak penyidik pada Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yakni waktu terjadinya tindak pidana pencucian uang pada umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan penyidik ketika pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan oleh pelaku. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana keterangan dari salah satau penyidik pembantu Sub Direktorat (Subdit) II Bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Dit Reskrimsus Polda Kalbar BRIPKA Arif Dwi Kurniawan, SH yang menerangkan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang di tangani Subdit II Bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Dit Reskrimsus Polda Kalbar adalah karena waktu terjadinya tindak pidana pencucian uang pada umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama, mengingat sebelum di proses dalam tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu penyidik memproses tindak pidana pokok. Selama proses pemeriksaan pidana pokok para pelaku pencucian uang ada kesempatan untuk menghindari jeratan penyidik.<sup>15</sup>

Sebab lain yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pencucian uang kompleksitas perkara pencucian uang sehingga memerlukan pengetahuan penyidik yang komprehensif. Selain itu tindak pidana pencucian uang melibatkan lembaga/ institusi lain, seperti : perbankan PPATK dan BPK. Kompleksitas perkara pidana pencucian uang memerlukan pengetahuan yang komprehensif dari aparat penegak hukum, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Brigadir Kepala Arief Dwi K, SH, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota pada tanggal 2 Deseember 2015

pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

Hasil wawancara dengan Penyidik Sub Direktorat (Subdit) III Bidang tindak pidana Korupsi Dit Reskrimsus Polda Kalbar Kopol Bermawis, SH, MH yang menerangkan bahwa Untuk kasus TPPU ini kami terkendala dalam pembuktian, karena harus melibatkan lintas sektoral, seperti harus mendapatkan keterangan dari saksi ahli, baik ahli dari PPTK maupun dari Ahli BPK.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui kendala yang dihadapi penyidik Polda Kalimantan Barat dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu :

- Keterbatasan jumlah aparat penyidik dan penyidik pembantu pada Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang Dit Reskrimsus Polda Kalbar.
- Kemampuan teknis dan taktis aparat penyidik dan penyidik pembantu pada Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang Dit Reskrimsus Polda Kalbar , Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

## **2. Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Korupsi di Polda Kalimantan Barat**

Perlu disadari bahwa keberadaan petugas Polri akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat. Masyarakat modern menuntut peranan Kepolisian bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warganegara dalam masyarakat, tetapi juga penanganan terhadap bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan baru sebagai upaya penegakan hukum (Law Enforcement) Masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum;

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kopol Bermawis, SH, Penyidik Subdit III Bidang Tindak Pidana korupsi Dit Reskrimsus Polda Kalbar pada tanggal 28 desember 2015

- c. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan dari masyarakat, di mana hukum itu diterapkan.<sup>17</sup>

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung di dalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan dengan “teori-teori hukum” yang sedang dikembangkan. Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya.<sup>18</sup>

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Seperti yang telah diuraikan di atas, hasil pembahasan dan analisa menunjukan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya peran penyidik Polda Kalbar dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan korupsi di wilayah Kalimantan Barat yaitu antara lain keterbatasan jumlah aparat penyidik, kemampuan teknis dan taktis aparat penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>17</sup> Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 5.

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, hal:88



### **1. Keterbatasan jumlah aparat penyidik pada Subdit II Bidang tindak pidana pencucian uang Dit Reskrimsus Polda Kalbar**

Sebagaimana telah di uraikan dalam pembahasan diatas, bahwa pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang di Polda Kalbar dilaksanakan oleh Direktorat Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) yakni bagian Sub Direktorat (Subdit) II Bidang tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan dengan 11 anggota dengan 2 diantaranya berpangkat Perwira Pertama dan 9 anggota berpangkat Bintara. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang khusus menangani perkara pencucian uang tersebut, jika di bandingkan dengan jumlah Subdit III Bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berjumlah 22 anggota dengan 4 diantaranya berpangkat Perwira Pertama dan 18 anggota berpangkat Bintara. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu pada Subdit tindak pidana pencucian uang jauh lebih sedikit, sehingga jumlah perkara yang di tangani Subdit II tindak pidana pencucian uang lebih jauh lebih sedikit di banding dengan Subdit III tindak pidana korupsi. Seharusnya jumlah penyidik yang ada di Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang lebih banyak dari jumlah penyidik pada Subdit III bidang tindak pidana korupsi, karena Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang, tidak saja menangani tindak pencucian uang dari kejahatan korupsi namun menangani seluruh kejahatan pencucian uang dari kejahatan lainnya.

Hasil wawancara dengan Briпка Ali Mahmudi, SH, selaku urmin (urusan administrasi) Dit Reskrimsus Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang sudah semestinya memiliki jumlah anggota lebih banyak banding dengan Subdit lainnya di Dit Reskrimsus Polda Kalbar karena semua kejahatan keuangan yang di tangani oleh Dit Reskrimsus Polda Kalbar dapat di tindak lanjuti pidana pencucian uangnya oleh Subdit II.<sup>19</sup>

Ketersediaan jumlah petugas penyidik juga menentukan cepat-lambatnya proses penyidikan. Beberapa kasus/ perkara tindak pidana pencucian uang membutuhkan penyidik dalam jumlah besar karena melibatkan banyak pelaku serta saksi yang harus diperiksa, serta harus secara intensif berkoordinasi dengan instansi/ lembaga terkait pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang. Dari penjelasan yang diuraikan di

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Briпка Ali Mahmudi, SH, selaku urmin (urusan administrasi) Dit Reskrimsus Polda Kalbar pada tanggal 28 desember 2015

atas, yaitu dengan perbandingan antara jumlah personil penyidik Subdit II dengan rata-rata jumlah kasus tindak pencucian uang per tahun dianggap tidak seimbang.

## **2. Kemampuan teknis dan taktis aparat penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang**

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>20</sup> yang mengatakan hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Dalam penegakan hukum sangat ditentukan adanya peran “penegak hukum”, karenanya dapat dikatakan beroperasinya hukum secara baik dimasyarakat sesuai dengan tujuan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga akan tergantung dari kualitas penegak hukum itu sendiri. Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian terutama menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan, moneter, manajemen dan sebagainya, adalah ciri betapa kompleksnya kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi, oleh karenanya penyidik Polri masih banyak mengalami kendala dalam kemampuan pembuktian terhadap berbagai kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi, sehingga ada kesan kualitas penyidik Polri belum memadai dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis yang berhubungan dengan pengungkapan modus operandi tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi.

Dalam mewujudkan kemandirian Polri sebagai alat negara penegak hukum yang sekaligus sebagai penyidik sebagaimana ketentuan KUHAP harus mempunyai kemandirian diri dan bersifat progresif untuk berinisiatif mengambil langkah-langkah penegakan hukum kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat, karena nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai dalam masyarakat yang dapat mewujudkan adanya dukungan masyarakat secara luas.

Hampir dalam setiap statement pakar hukum menyatakan bahwa keberhasilan usaha penegakan hukum sangat bergantung pada kondisi dan dukungan masyarakat untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara tuntas, oleh karenanya di perlukan kemampuan penyidik untuk

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2002. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru. hlm..11

meindaklanjuti setiap perkara korupsi pada kasus pidana pencucian uang sehingga dapat mengungkap semua aktor “pengambil” uang negara untuk di pertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu pengungkapan perkara tindak pidana dari perkara korupsi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah di korupsi oleh para pelaku. hal inilah diperlukan kualitas dan kemampuan penyidik Polri baik secara teknis dan taktis dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi sehingga mampu membangun imej positif masyarakat sebagai bagian dari tuntutan akuntabilitas publik.

Saat ini penyidik Polda Kalbar yang menangani tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Subdit II Bidang tindak pidana pencucian uang, dimana tidak semua anggota telah mengikuti pelatihan dan pendidikan kejuruan terkait fungsi teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana keterangan dari hasil wawancara dengan Ipda Gunawan, SH, selaku penyidik Subdit II Bidang tindak pidana pencucian uang Dit Reskrimsus Polda Kalbar yang menerangkan bahwa tidak semua personel Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang sudah pernah mengikuti pelatihan maupun pendidikan kejuruan, adri jumlah anggota sebanyak 11 personel hanya 4 personel yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan terkait fungsi teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang, sebanyak 7 personel mereka merupakan penyidik yang belajar secara mandiri dan otodidak untuk menjadi melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pencucian uang.<sup>21</sup>

Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan penyidik Polri baik secara teknis dan taktis dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi, melalui program pelatihan dan pendidikan kejuruan. Adapun metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik Polri agar memiliki kualitas yang diharapkan yaitu melalui upaya-upaya :

a) Pendidikan

Kualitas penyidik Polri yang ditopang dengan pendidikan yang memadai akan membentuk penyidik yang profesional. Hal ini sulit untuk disangkal karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin mudah dalam menangkap gagasan-gagasan modern, seperti adanya issue demokratisasi, HAM, kemerdekaan berpendapat,

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ipda Gunawan, SH, selaku penyidik Subdit II Bidang tindak pidana pencucian uang Dit Reskrimsus Polda Kalbar pada tanggal 28 desember 2015

transparansi dan sebagainya. Berbagai penelitian yang menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan dengan kinerja Polisi, antara lain dibuktikan bahwa Polisi yang tingkat pendidikannya lebih tinggi memiliki kepekaan terhadap masyarakat, lebih memiliki kemampuan berkomunikasi dan cara bertindak dalam pelaksanaan tugas. Secara singkat polisi dengan pendidikan yang baik cenderung lebih adil, jujur dan efektif. Menyadari pentingnya arti pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas penyidik Polri, maka diperlukan pendidikan jenis kejuruan ataupun spesialisasi dibidang Reskrim serta pendidikan pembentukan dan pengembangan yang mampu mendukung terealisasinya kualitas penyidik Polri yang profesional.

Adapun jenjang pendidikan yang perlu ditempuh, yaitu :

(1) Pendidikan Kejuruan.

(a) Kejuruan Pamen Senior Reskrim dibidang tindak pidana pencucian uang.

- Peserta adalah Pamen berpangkat AKBP atau Kompol yang telah lulus mengikuti pendidikan Sespim Polri.
- Telah mengikuti pendidikan kejuruan Reserse Spesialisasi tindak pidana pencucian uang.
- Tujuan dari pendidikan untuk membentuk Pamen yang mampu memenej proses penyidikan secara profesional sesuai dengan spesialisasinya

(b) Pendidikan Kejuruan Spesialisasi tindak pidana pencucian uang.

- Peserta adalah terdiri dari Pama dengan pangkat Iptu/AKP, dan Bintara dengan pangkat Briptu s/d Aiptu.

(c) Pendidikan Kejuruan CID Luar Negeri.

- Peserta adalah Pama ke atas.

(2) Pendidikan Pelatihan.

Bahwa penataan lapis kemampuan tidaklah hanya dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan bagi anggota Polri dilapangan, namun secara mendasar harus dimulai dari tingkat pendidikan pembentukan, yang selanjutnya secara simultan dilaksanakan pula ditingkat pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan dalam rangka memantapkan lapis kemampuan fungsi Reskrim. Peningkatan kualitas penyidik Polri tidak saja dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan (knowledge) tetapi juga

diperlukan peningkatan keterampilan (skill) sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan hukum, pengetahuan teknis dan taktis) melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap penyidik Polri baik secara individu maupun kesatuan akan selalu terpelihara kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari kejahatan korupsi.

- (3) Melaksanakan kursus-kursus keterampilan terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang keberhasilan tugas penyidikan,

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manager dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>22</sup> Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Suatu organisasi memperoleh tenaga kerja, melatih mereka, dan kemudian memberikan pengupahan yang layak dan adil, tugas manajemen sumber daya manusia belum selesai, karena dalam kenyataan, tidak selalu seseorang yang telah digaji cukup akan merasa puas dengan pekerjaannya. Banyak faktor (di samping gaji) yang menyebabkan orang merasa puas atau tidak puas bekerja pada suatu organisasi. Sama halnya dengan kondisi yang dihadapi pada organisasi Polri, dimana para anggota tidak akan cukup puas dengan hanya diberi gaji, karena ada hal-hal lain yang dibutuhkan selain daripada kecukupan materiil.

Relevansinya dari seorang pimpinan pada organisasi Polri, atau lebih spesifik pimpinan pada tingkat Direktorat Polda Kalbar adalah orang yang bekerja dengan bantuan orang lain. Ia tidak menjalankan semua pekerjaan sendirian saja, melainkan mengarahkan orang lain dalam tim untuk melaksanakannya. Jika tugas yang diarahkan tidak dapat dilaksanakan oleh anggotanya, seorang pimpinan harus mengetahui sebab-sebabnya. Motivasi merupakan unsur hakiki dalam integrasi antara pribadi individu (dalam hal ini anggota) dan tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pemberian motivasi merupakan salah satu fungsi dan tugas dari seorang manager / pimpinan. Ia harus

---

<sup>22</sup> Implementasi Teori Motivasi Abraham Maslow dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. <http://burjosiaak.blogspot.com>, di unduh 1 januari 2016

mampu memotivasi individu-individu yang terlibat untuk dapat memberikan kinerja yang optimal demi pencapaian tujuan organisasi. Oleh itu, dari hasil analisa terhadap kondisi saat ini, selanjutnya dikemukakan beberapa kondisi ideal yang diharapkan dari terselenggaranya pemenuhan kebutuhan/motivasi. Kompleksitas penanganan perkara tindak pidana pencucian uang memerlukan pengetahuan yang komprehensif dan motivasi dari setiap aparat penegak hukum. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan sarana bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

### **3. Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pencucian uang**

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal.

Pentingnya peranan sarana/ fasilitas dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.<sup>23</sup> Proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak korupsi dimasa datang akan dihadapkan pada berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan modus operandi menggunakan kecanggihan dari teknologi, untuk itu dalam melakukan penyidikan diperlukan juga pemanfaatan teknologi Kepolisian sebagai sarana maupun cara dalam pelaksanaan tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk mengungkap setiap kasus tindak pidana

---

<sup>23</sup> Opcit, Soerjono soekanto, hal 36

pencucian uang dari kejahatan korupsi yang terjadi. Dari hasil pengamatan secara nyata menunjukkan kelemahan penyidik Polri dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi Kepolisian untuk menunjang keberhasilan tugas penyidikan dan bahkan cenderung beranggapan pemanfaatan teknologi kepolisian menghambat dalam pengungkapan setiap kasus yang terjadi.

Para koruptor mempunyai berbagai cara dan jalan yang biasa dipilih untuk mengamankan, misalnya dengan menggunakan rekayasa financial (financial engineering) yang pada umumnya telah tersedia dalam praktek bisnis di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan untuk mengkaburkan asal usul aset yang dikorupsi dan dengan demikian pengamanan hasil aset korupsi itu dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta menggunakan celah celah hukum sehingga terlindungi dengan baik, oleh karena itu dapat dikatakan kejahatan korupsi ini mempunyai dampak merusak dalam “spectrum” yang sangat luas.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengadili serta mengejar kemudian menyita dan merampas aset koruptor yang dibawa keluar negeri bukanlah suatu hal yang mudah karena berbenturan dengan hukum yang mengatur, karena sebagaimana yang selama ini dipergunakan, dengan menggunakan sarana instrumen hukum perdata hampir tidak ada manfaatnya, karena undang undang korupsi tidak memberikan kekhususan dengan diutamakannya persidangan dalam penyelesaian melalui instrument perdata. Upaya pengembalian melalui instrument perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya). Penempatan hasil kejahatan Pencucian uang merupakan salah satu dari bidang pengawasan PPATK dimana banyak terdapat transaksi yang mencurigakan dan merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional yang sangat berdampak negatif terhadap perekonomian negara sehingga mendorong negara negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian yang sangat besar untuk hal ini.

Untuk itu dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang di perlukan dukungan sarana berupa kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dukungan penuh pemerintah memainkan peran yang sangat krusial dalam membantu dalam proses penyidikan. Bila tidak ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga/ intansi

---

<sup>24</sup> Taufiqurrahman Ruki, KPK dan Jejaring Internasional Rezim Anti Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi, Seminar Nasional Sinergi Pemberantasan Korupsi, Gedung bank Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta: 4 April 2006

terkait, serta dukungan yang hanya setengah hati dari pemerintah maka striker-striker yang diharapkan dapat tercipta dan bertambah oleh undang-undang ini hanya akan menjadi macan kertas, dan hal itu jelas tidak sesuai dengan tekad bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan integritas finansial Indonesia. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan tindak pidana pencucian uang terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, dikarenakan. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Negara-negara dimana pelaku tindak pidana pencucian uang atau uang hasil tindak pidana pencucian uang tersebut berada.

Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri. Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana pencucian uang yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia. Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.

Hasil wawancara dengan Ipda Encep Maman, SH, selaku Penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Wilayah hukum Polda Kalbar berbatasan langsung (Batas darat) dengan negara tetangga Malaysia dan Brunai Darussalam, sehingga ketika pelaku ataupun saksi berada di luar negeri akan menyulitkan proses penanganannya tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi, sehingga di perlukan sarana berupa peraturan ataupun kerja sama dengan negara terkait untuk mempermudah penyidik dalam proses pemeriksaan yang dituangkan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>25</sup> Selain terkendala akan sarana guna pemeriksaan ke luar negeri, kendala sarana untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ipda Encep Maman, SH, selaku Penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Wilayah hukum Polda Kalbar pada tanggal 28 desember 2015



adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (court order). Permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan (court order).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan masyarakat harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia. Dengan adanya beberapa kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang khususnya dari hasil kejahatan korupsi tidak semudah yang dibayangkan. Banyak liku-liku permasalahan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik permasalahan yang berkaitan dengan prosedur dalam aturan hukum, maupun permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang dibutuhkan tidak hanya sekedar kemampuan sumber daya manusia yang handal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun sinergitas di antara pemangku kepentingan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan, lembaga penegakan hukum, PPATK, Perbankan dan instansi terkait lainnya sebagai sub sistem.

### **Penutup**

Berdasarkan analisis masalah di atas, maka dapat disimpulkan :

- a. Bahwa penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan korupsi di Polda Kalbar dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 6 perkara hanya 8,45 % dari total 71 perkara korupsi ditingkat penyidikan yang ditangani Polda Kalbar, sehingga dapat dikatakan peran penyidik Polda Kalbar dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana pokok (predicate crimes) tindak pidana korupsi belum maksimal.

- b. Kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik Polda Kalbar dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi di Polda Kalbar diantaranya: (a) Keterbatasan jumlah aparat penyidik dan penyidik pembantu pada Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang Dit Reskrimsus Polda Kalbar; (b) Kurangnya Kemampuan teknis dan taktis aparat penyidik dan penyidik pembantu pada Subdit II bidang tindak pidana pencucian uang Dit Reskrimsus Polda Kalbar; dan (c) Dukungan sarana dan prasana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran tugas penyidikan sehingga dapat memperlambat proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi

## Daftar Pustaka

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011)
- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999)
- B.Simanjuntak, Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana, Tarsito, bandung, 1982
- Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalam Sketsa, Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010)
- Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bibit Samad Rianto, Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat ,PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006
- Bismar nasution, Regim Anti Money laundering di Indonesia, Jakarta: Books Terrace & Library, Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (Jakarta, 1998)
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004
- Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF- VII Report on Money Laundering Typologies

- H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012)
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010)
- Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Deskriptif*, CV Bina Niaga Jaya, PPSA, Lemhanas RI, 2007
- Jeffrey Robinson, *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994
- Jenriswandi Damanik, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya*, Makalah Seminar, 1997
- Kf. Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Koespramono Irsan, *Peranan Hukum Nasional Dalam Membela Money Laundering*, Makalah Seminar, 1997
- Lawrence M. Friedman, 1977 *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1977)
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Jakarta 1994
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1983
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999)
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *hukum acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

- Muhammad Yusuf dkk, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media (Yogyakarta, 2009)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung Almani; 1992
- Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 2009
- P.A.F Lamintang.. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHP, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi, Sinar Grafika, 2010
- Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Uang Globalisasi, Total Media Jakarta, 2013
- Priyanto, dkk, Instrumen Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun, Jakarta: PPATK, 2007
- Romli Atmasasmita, “Globalisasi dan Kejahatan Bisnis”, Jakarta, Kencana, 2010
- Romli Atmasasmita,1, Pengembalian dan Pengelolaan Aset Korupsi, Harian Sindo, 27 Juli 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa jenis socio legal research dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Disini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial (Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, 1988, hal: 34-38).

- Sanafiah Fasisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006
- Soedarto, *Hukum Pidana I* Fakultas Hukum, Semarang : Undip, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di Indonesia*, UIpress, Jakarta, 1983
- Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996
- Sulistiyowati Irianto, **Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Sutan Remy Sjahdeny, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Syaipul Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan-Pembaruan Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta Total Media, 2010
- Taufiqurrahman Ruki, *KPK dan Jejaring Internasional Rezim Anti Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Nasional Sinergi Pemberantasan Korupsi, Gedung bank Indonesia, Kebon Sirih, Jakarta: 4 April 2006

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005)
- Wirdjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 1989
- Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum, PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia (Jakarta, 2008)
- Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 2003)
- Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung: Books Terrace & Library, 2007

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang - Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Sumber data Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kalbar, pada 25 januari 2016
- Sumber data dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalbar, pada 25 januari 2016
- Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK, Jakarta: PPATK, 2003
- Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **Sumber data dari Internet**

Implementasi Teori Motivasi Abraham Maslow dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. <http://burjosiaak.blogspot.com>

<https://antonwords.wordpress.com/2014/01/14/pembuktian-terbalik-tindak-pidana-pencucian-uang-atau-money-laundering/>

<https://index.baselgovernance.org/ranking>

<http://equator.co.id/36-kasus-tipikor-di-pn-pontianak-inkrah/>,

<http://parismanalush.blogspot.co.id/2015/03/perampasan-aset-terhadap-hasil-tipikor.html>,

<http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang>.,

<http://www.sahamok.com/pasar-modal/perusahaan-sekuritas-bei-anggota-bursa/>,

<https://books.google.co.id/books?id=X1vSUFCbrdsC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=Understanding+the+Wash+Cycle,+Money+Laundering-Economic&source=bl&ots=SnUZsVUp7Z&sig=VINDqoD6yqU40FEbPNRiWIdubPg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwikiujtm4nNAhUEoJQKHRC6BKMqQ6AEIITAB#v=onepage&q=double%20invoicing.&f=false>,

<https://sudiarsa.wordpress.com/2007/06/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/>,

<https://evirizkirahmadani.wordpress.com/2012/05/30/korupsi-dan-otonomi-daerah/>,

<http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/teori-perubahan-sosial-di-asia/>,

<http://www.radarambon.co/readopini-20120615001419-sandiwara--di-balik--penegakan-hukum-tajuk>,